

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Jawa Tengah secara geografis berada pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Adapun secara administratif wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur; dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdiri dari 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 769 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2015 diproyeksikan sebanyak 33.774.141 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 16.750.898 jiwa (49,59%) dan perempuan sebanyak 17.023.243 Jiwa (50,41%) sehingga besar rasio jenis kelamin (RJK) adalah sebesar 98,37, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes (1,781 juta jiwa) sedangkan paling sedikit berada di Kota Magelang (120,79 ribu jiwa).

Kinerja pembangunan ekonomi di Jawa Tengah selama periode tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Apabila pada tahun 2015 perekonomian Jawa Tengah mampu tumbuh sebesar 5,4%, maka pada triwulan III 2016 ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah mencapai 5,06% dimana proyeksi Bank Indonesia atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV diperkirakan akan meningkat akibat konsumsi masyarakat yang didorong oleh hari raya Natal dan Tahun Baru serta realisasi investasi baik dari swasta maupun pemerintah. Adapun tingkat inflasi tahunan pada 2016 juga relatif terjaga pada kisaran 2,36%, lebih rendah dibanding tahun 2015 sebesar 2,73%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah makanan (telur ayam ras, cabai rawit, dan kubis), bensin, dan tarif pulsa ponsel, sementara komoditas yang menyumbang deflasi adalah cabe merah, bawang merah, emas perhiasan, semen dan apel. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi terjaga, jumlah penduduk miskin pada 2016 mengalami penurunan sebesar 12,03 ribu jiwa menjadi 4,49 juta orang (13,19%) dibanding tahun 2015. Hal ini didasari bahwa sumbangan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar (73,25%) dibandingkan komoditi non makanan.

Saat ini, terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi situasi perekonomian di Jawa Tengah diantaranya perkembangan situasi politik nasional dalam menghadapi Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017,

potensi perlambatan ekonomi global akibat kebijakan proteksionisme negara – negara maju (Gerakan BREXIT, *American First*), maupun melemahnya daya beli masyarakat akibat pencabutan subsidi listrik bagi 23 juta pelanggan listrik 900 VA. Meskipun demikian, prospek ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 masih cukup positif disebabkan adanya beberapa faktor pengungkit yaitu :

1. Dukungan berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Selesainya pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah, terutama akses jalan dan pengembangan kawasan wisata strategis.
3. Potensi jumlah penduduk yang dapat menjadi pasar sekaligus sumber tenaga kerja.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan di atas, adanya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2013 – 2018, serta penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018.

Penyusunan Renstra OPD ini sendiri sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra OPD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan.

Renstra Tahun 2017 – 2018 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terkait pembangunan KUKM di Jawa Tengah yang memuat tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Koperasi UKM dalam mewujudkan target – target RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 serta memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015 – 2019. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi JawaTengah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 -2029.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
22. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546 Tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) Berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM adalah dokumen perencanaan pembangunan Koperasi dan UKM periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2018. Renstra ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman pembangunan Koperasi dan UKM bagi para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, KUKM, dan masyarakat agar lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dua tahun ke depan
- b. Untuk mengarahkan pemberdayaan Koperasi dan UKM oleh para pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan UKM serta masyarakat luas.
- c. Untuk mengarahkan peran Koperasi dan UKM dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran

#### **1.4 Sistematika Rencana Strategis**

Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Jawa Tengah nomor 050.11/0000767 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penyusunan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Adapun sistematika rencana strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD, menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pembangunan KUKM.
- c. BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan pelayanan OPD, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, serta penentuan isu strategis.
- d. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, menjelaskan mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah OPD, serta Strategi dan Kebijakan OPD.
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, menjelaskan mengenai program kegiatan SKPD, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.
- f. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, menjelaskan mengenai indikator kinerja OPD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- g. BAB VII PENUTUP, menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, serta simpulan Renstra OPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016 Bab II tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usahadan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahkan :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kelembagaan;
  - c. Bidang Pengawasan;

- d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
  - e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  4. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagian sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
2. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
  - g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
  - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas :

- a) Subbagian Progam yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- b) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di umum dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

**b. Bidang Kelembagaan.**

1. Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana
2. Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata laksana; dan
  - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kelembagaan terdiri atas :
  - a) Seksi organisasi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  - b) Seksi Tata Laksana yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata laksana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.



**c. Bidang Pengawasan.**

1. Bidang Pengawasan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penilaian kesehatan.
2. Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan; dan
  - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengawasan terdiri atas :
  - a) Seksi Pengawasan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  - b) Seksi Penilaian Kesehatan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

**d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran.**

1. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan pemasaran.
2. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
  - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri atas :
  - a) Seksi Produksi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- b) Seksi Pemasaran yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

**e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan.**

1. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusankebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha dan pembiayaan.
2. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
  - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan terdiri atas :
  - a) Seksi Restrukturisasi Usaha yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  - b) Seksi Pembiayaan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

**f. UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM**

Berdasarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (UPTD Balatkop dan UMKM) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, UPTD Balatkop dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan
4. Seksi Penyelenggara
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM.

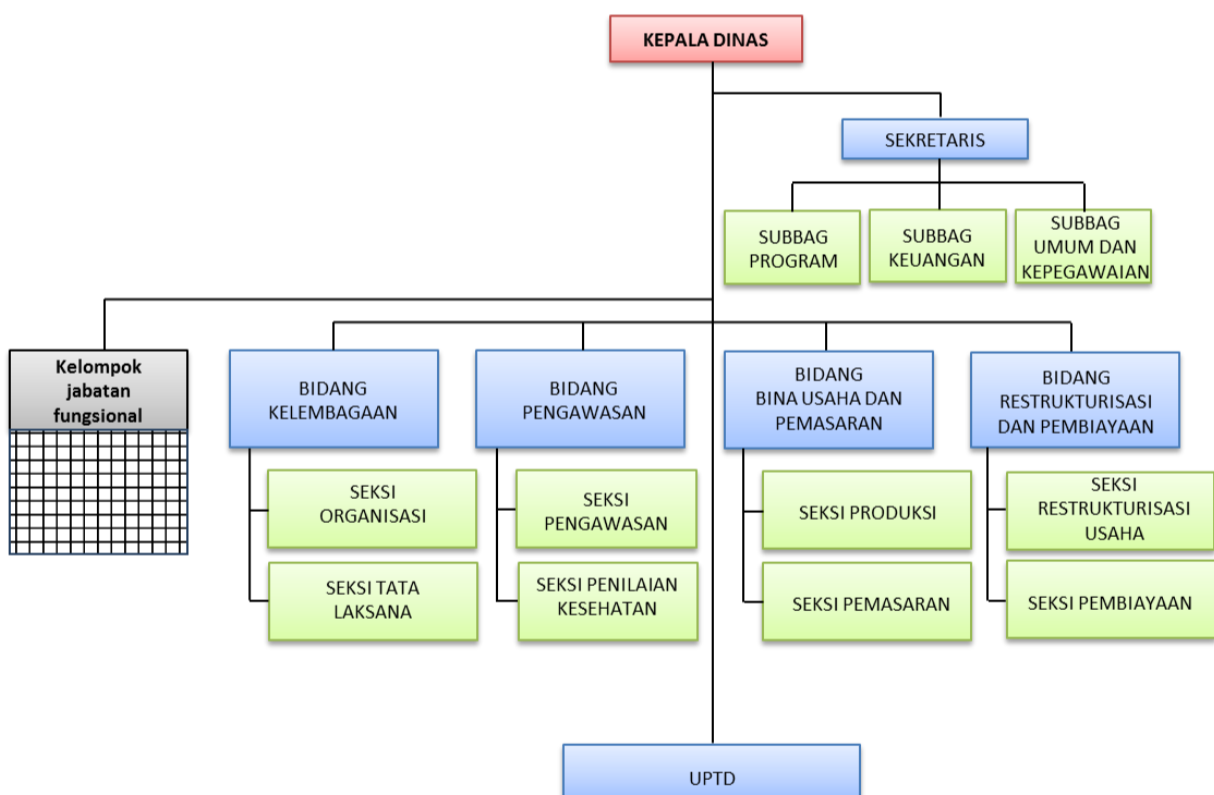
Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
4. Seksi Penyelenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

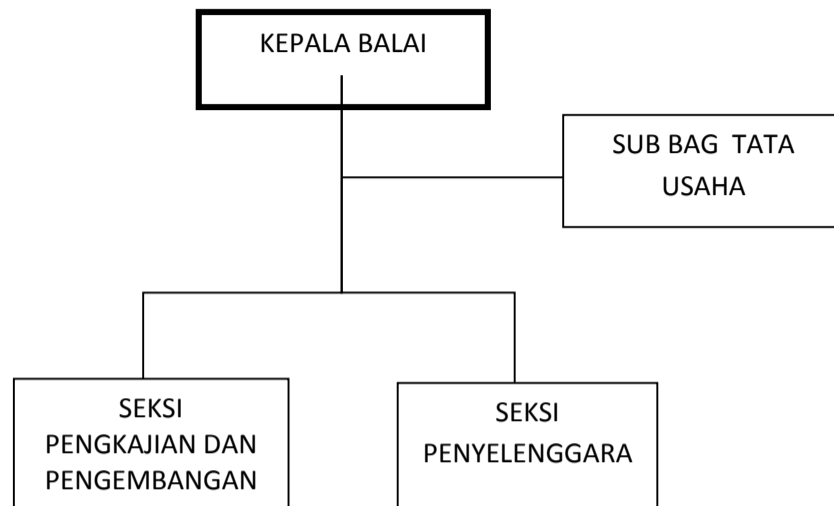
6. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
8. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
9. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur lengkap organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD Balatkop dan UMKM ditampilkan dalam gambar 2.1. dan gambar 2.2.

**GAMBAR 2.1.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**GAMBAR 2.2.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN**  
**UMKM PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA**  
**MIKRO KECIL DAN MENENGAH**  
**( PERGUB No 41/2008, Tgl 20 Juni 2008 )**



**2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH**

**1. Sumber Daya Pegawai**

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sebanyak 135 orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 134 orang

Pekerja Harian Lepas : 1 orang

**Tabel 2.1.**  
**Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan**

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	2	0	6	0	10	16	3	1	38
Kelembagaan	1	0	2	2	6	3	2	2	18
Pengawasan	0	0	3	0	6	6	1	1	17
Bina Usaha & Pemasaran	0	0	1	0	11	4	2	1	19
Restrukturisasi & Pembiayaan	0	0	1	0	9	4	2	1	17
Balatkop	4	0	2	1	6	8	1	1	23
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	1	0	0	1	2
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>134</b>

**Tabel 2.2.**  
**Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan**

BIDANG	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	3	0	5	0	2	1	5	13	6	3	38
Kelembagaan	0	0	0	1	5	0	0	0	2	3	4	3	18
Pengawasan	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3	4	4	17
Bina Usaha & Pemasaran	0	0	0	0	2	0	2	0	1	4	9	1	19
Restrukturisasi & Pembiayaan	0	0	0	0	4	0	0	0	5	3	3	2	17
Balatkop	1	0	0	0	7	3	0	0	4	5	1	2	23
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>134</b>

**Tabel 2.3.**  
**Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin**

ESSELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Esselon II	-	1 orang	1 orang
Esselon III	3 orang	3 orang	6 orang
Esselon IV	8 orang	6 orang	14 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>11 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>21 orang</b>

Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balatkop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM. Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung pelayanan perkantoran, Dinas Koperasi UKM menggunakan jasa dari penyedia jasa (*outsourcing*) untuk tenaga kebersihan sebanyak 26 orang, pramutaman sebanyak 1 orang serta tenaga keamanan sebanyak 21 orang

## 2. Aset Tetap

Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**  
**Tanah dan Gedung Yang Dimiliki**

NO	URAIAN	LUAS
1	Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari a. Tanah Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	3.243 M <sup>2</sup>
	b. Tanah UPTD Balatkop 1	5.500 M <sup>2</sup>
	c. Tanah UMKM Center	2.617 M <sup>2</sup>

NO	URAIAN	LUAS
	d. Tanah UPTD Balatkop 2	2.320 M <sup>2</sup>
	e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	927 M <sup>2</sup>
	f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	480 M <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari	
	a. Bangunan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	1.486 M <sup>2</sup>
	b. Bangunan Balatkop	3.367 M <sup>2</sup>
	c. Bangunan UMKM Center	2.990 M <sup>2</sup>
	d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	654 M <sup>2</sup>
	e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	120 M <sup>2</sup>

### 3. Aset Bergerak

Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.5.

**Tabel 2.5.**  
**Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 13 (tiga belas) unit terdiri dari :	
	a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54)	1 unit
	b. Toyota Innova Tahun 2014 (H 275)	1 unit
	c. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR)	1 unit
	d. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR)	1 unit
	e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG)	1 unit
	f. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR)	1 unit
	g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG)	1 unit
	h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG)	1 unit
	i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR)	1 unit
	j. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ)	1 unit
	k. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR)	1 unit
	l. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ)	1 unit
	m. Pick Up Tahun 2015 (H 9579 VG)	1 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 8 (delapan) unit terdiri dari	
	a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	8 unit

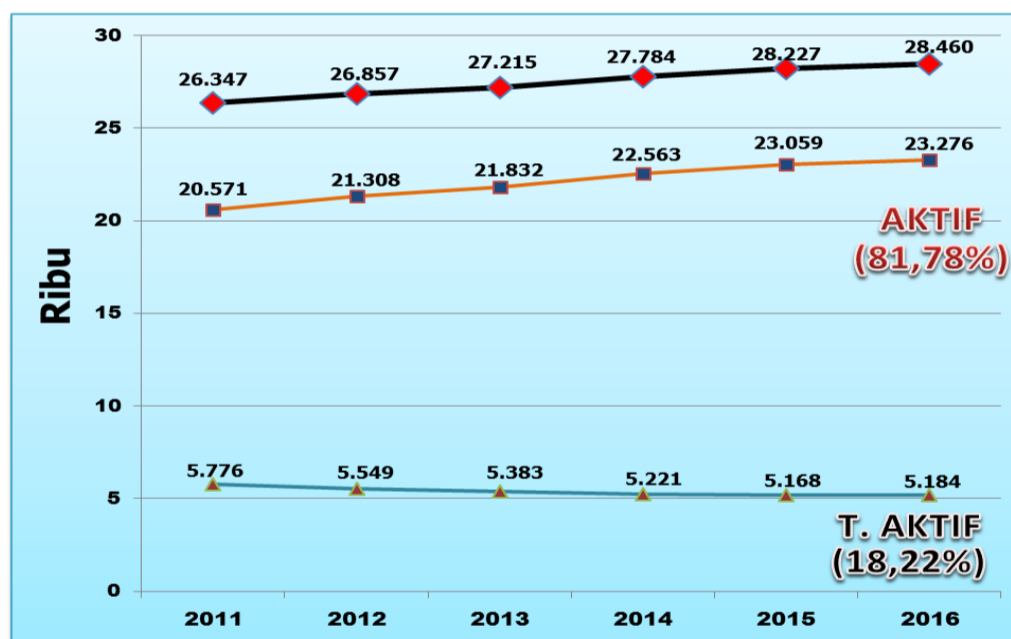
#### 4. Aset Lainnya

Selain aset tetap dan bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan bagi masyarakat KUMKM, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah juga memiliki berbagai aset pendukung lainnya seperti yang tercantum dalam Buku Aset Dinas.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Terkait Pemberdayaan sektor Koperasi dan UMKM, perkembangan jumlah koperasi di Jawa Tengah selama periode 2013 – 2016 mengalami pertumbuhan positif. Pada 2013 jumlah Koperasi sebanyak 27.215 unit dan meningkat 1.245 unit (54,48%) menjadi 28.460 unit pada 2016, dengan jumlah koperasi aktif mencapai 23.276 unit atau meningkat sebanyak 1.444 unit (6,61%), dengan proporsi koperasi tidak aktif semula 19,78% turun menjadi 18,22% pada akhir tahun 2016. Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam gambar 2.3.

**Gambar 2.3.**  
**Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif, dan Koperasi Tidak Aktif (Unit)**

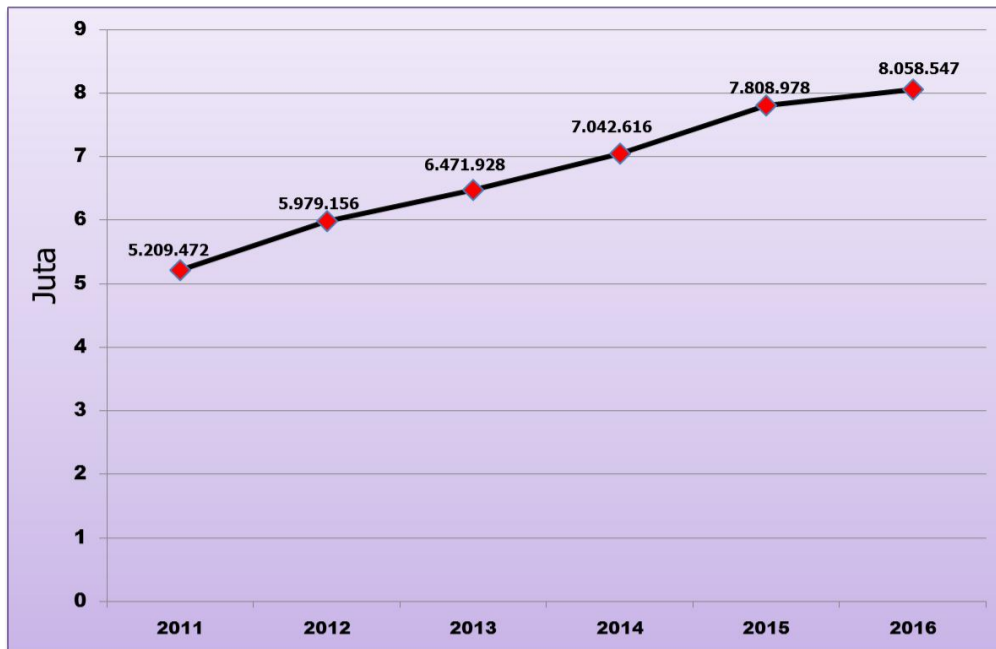


**Sumber : Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**

Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi, dimana semula 6.471.928 orang pada 2013, menjadi 8.058.547 orang pada akhir tahun 2016, meningkat 24,52%, atau sebanyak 1.586.619 orang. Gambar 2.4.menyajikan perkembangan jumlah anggota koperasi di Jawa Tengah.



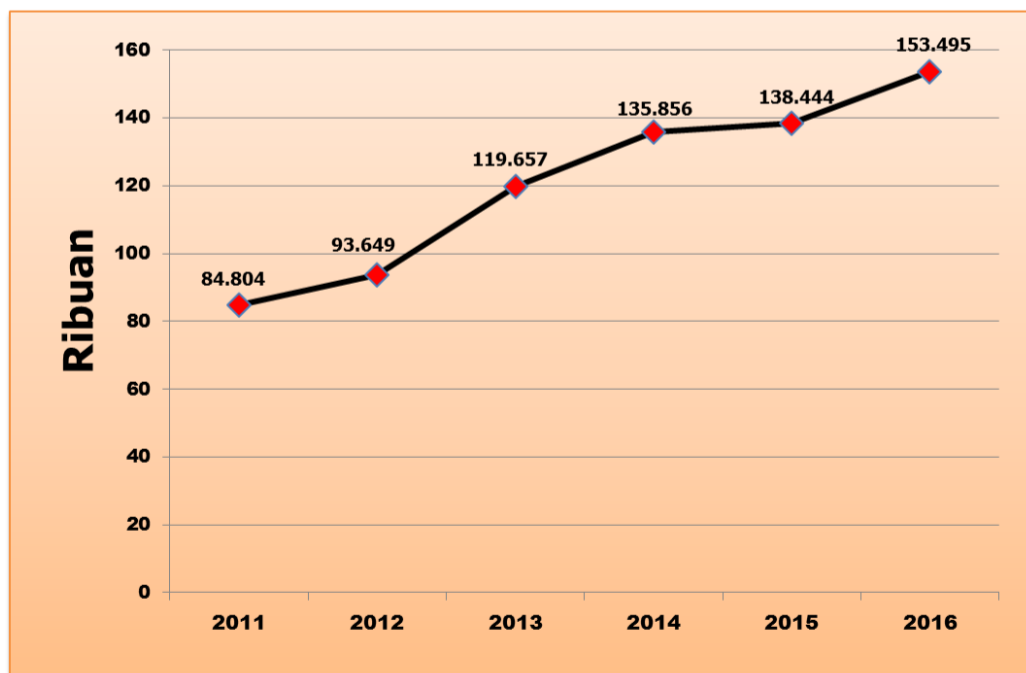
**Gambar 2.4.**  
**Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi (Orang)**



**Sumber : Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**

Peningkatan jumlah koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja, terutama pada sektor manajerial dan jasa. Bila pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja koperasi baru sebanyak 119.657 orang, maka per Desember 2016 koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 153.945 orang, meningkat 28,28% atau 33.838 orang. Berikut disajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi pada gambar 2.5.

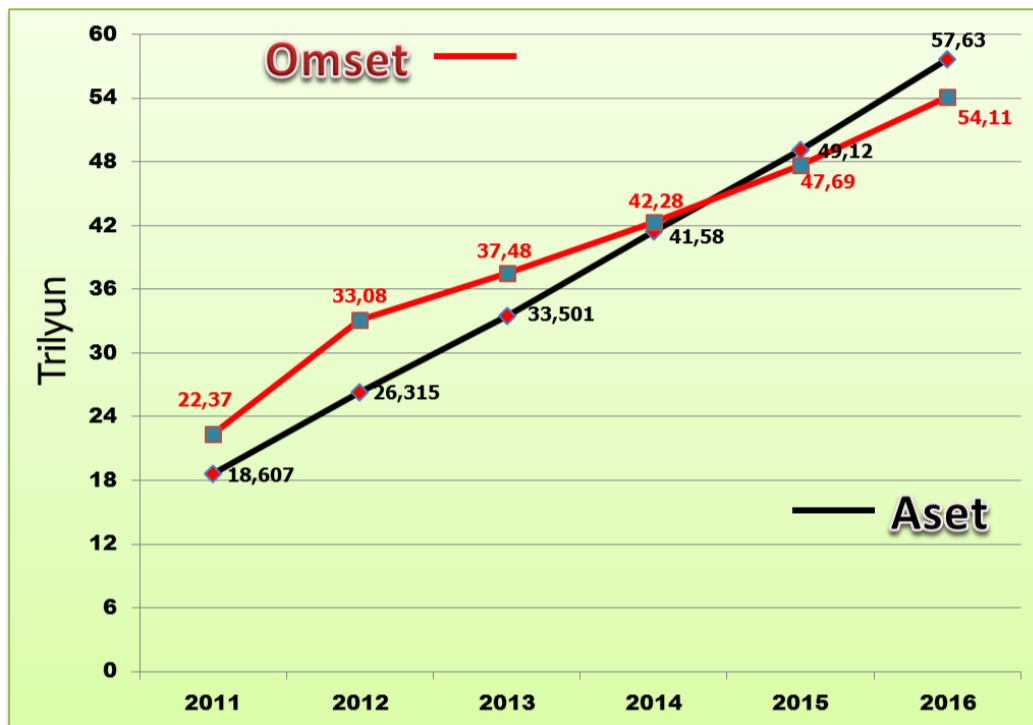
**Gambar 2.5.**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi (Orang)**



**Sumber : Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**

Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Apabila omzet Koperasi pada 2013 baru sebesar Rp. 37,481 triliun maka tahun 2016 telah tumbuh menjadi Rp. 54,112 triliun, meningkat sebesar Rp. 16,630 triliun atau 44,37%. Demikian juga aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang mengagumkan, bila pada 2013 baru sebesar Rp. 33,501 triliun, maka pada Desember 2016 menjadi Rp. 57,638 triliun atau tumbuh sebesar 64,40%. Gambar 2.6. menyajikan perkembangan omzet dan aset Koperasi di Jawa Tengah.

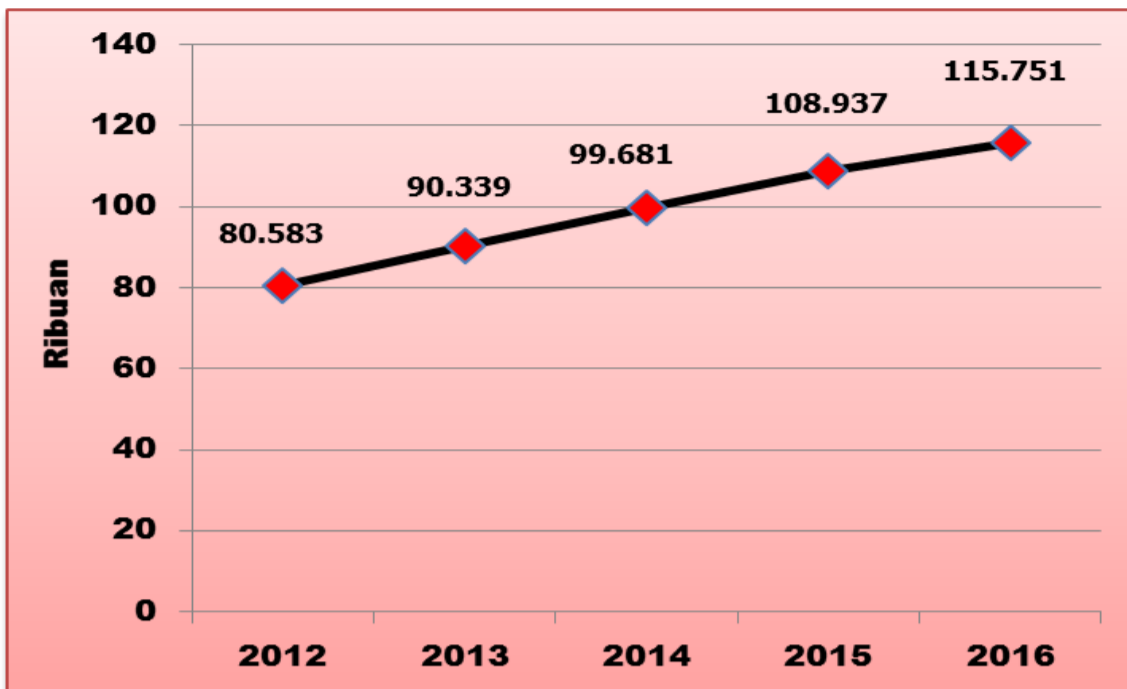
**Gambar 2.6.**  
**Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi (Trilyun Rupiah)**



**Sumber : Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**

Sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina juga mengalami peningkatan. Pada 2013 jumlah UMKM sebanyak 90.339 UMKM dan meningkat sebanyak 25.412 UMKM (28,13%) menjadi 115.751 UMKM pada akhir 2016, dengan penyerapan tenaga kerja pada 2013 sebesar 480.508 orang menjadi 791.767 orang atau meningkat 311.259 orang (64,78%). Aset UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan, pada 2013 Aset UMKM sebesar Rp. 9,634 triliun, dan pada 2016 sebesar Rp. 22,891 triliun atau meningkat Rp. 13,257 triliun (137,61%), dengan omzet tahun 2013 semula Rp. 20,345 triliun menjadi Rp. 43,570 triliun pada 2016, atau meningkat sebanyak Rp 23,225 triliun (114,16%). Berikut disajikan dalam gambar 2.7. Jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 2.7.**  
**Perkembangan UMKM Binaan**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah (Unit)**



**Sumber : Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) indikator RPJMD dan 4 (empat) indikator SKPD dimana hingga akhir 2016 terdapat 1 (satu) indikator yang telah melampaui target yaitu Presentase UMKM yang telah mengakses kredit dengan capaian sebesar 29,46% dibandingkan dengan target 25,8% atau 114,18%. Sedangkan 6 (enam) indikator yang lain telah berada pada jalur yang tepat dan pada akhir 2018 diperkirakan dapat tercapai seluruhnya. Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD 2013 – 2018 per Desember 2016 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dalam tabel 2.6.

**TABEL 2.6.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD**  
**DINAS KOPERASI UKM PROV. JATENG**

No	Indikator Kinerja	Target RKPDP 2014	Target RKPDP 2015	Target RKPDP 2016	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	% 2014	% 2015	% 2016
<b>Indikator Kinerja RPJMD</b>										
1	Persentase Koperasi Aktif terhadap Jumlah Koperasi	80,71%	81,05%	81,45%	81,20%	81,69%	81,78%	100,61%	100,79%	100,41%
2	Persentase Koperasi Sehat terhadap KSP	15,70%	16,20%	17,15%	15,96%	16,71%	18,80%	101,66%	103,15%	109,62%
3	Jumlah Produk OVOP	105	140	175	105	140	175	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Indikator Kinerja SKPD</b>										
4	Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	32,75%	43%	52%	40,41%	43,73%	52,13%	123,39%	101,70%	100,25%
5	Persentase UMKM yg telah mengakses kredit	22%	24%	25%	29,63%	29,18%	29,46%	134,68%	121,58%	117,84%
6	Jangkauan pemasaran produk KUMKM	7 Prov	10 Prov, 1 LN	13 Prov, 2 LN	7 Prov	10 Prov, 1 LN	15 Prov, 4 LN	100%	100%	126,67%
7	Jumlah SDM KUMKM yg terlatih	12.950	14.175	15.625	13.140	14.175	15.625	101,47%	100,00%	100,00%

Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM selama periode 2013 – 2016 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dilandasi prioritas pembangunan Jawa Tengah yang dititikberatkan pada sektor infrastruktur selama tahun 2014 – 2015. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur secara masif, akan mendorong peningkatan kualitas sarana prasarana perekonomian dalam mendukung pengembangan koperasi dan UKM di Jawa Tengah. Berikut ditampilkan alokasi anggaran APBD Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah periode 2013 – 2016 dalam tabel 2.7.

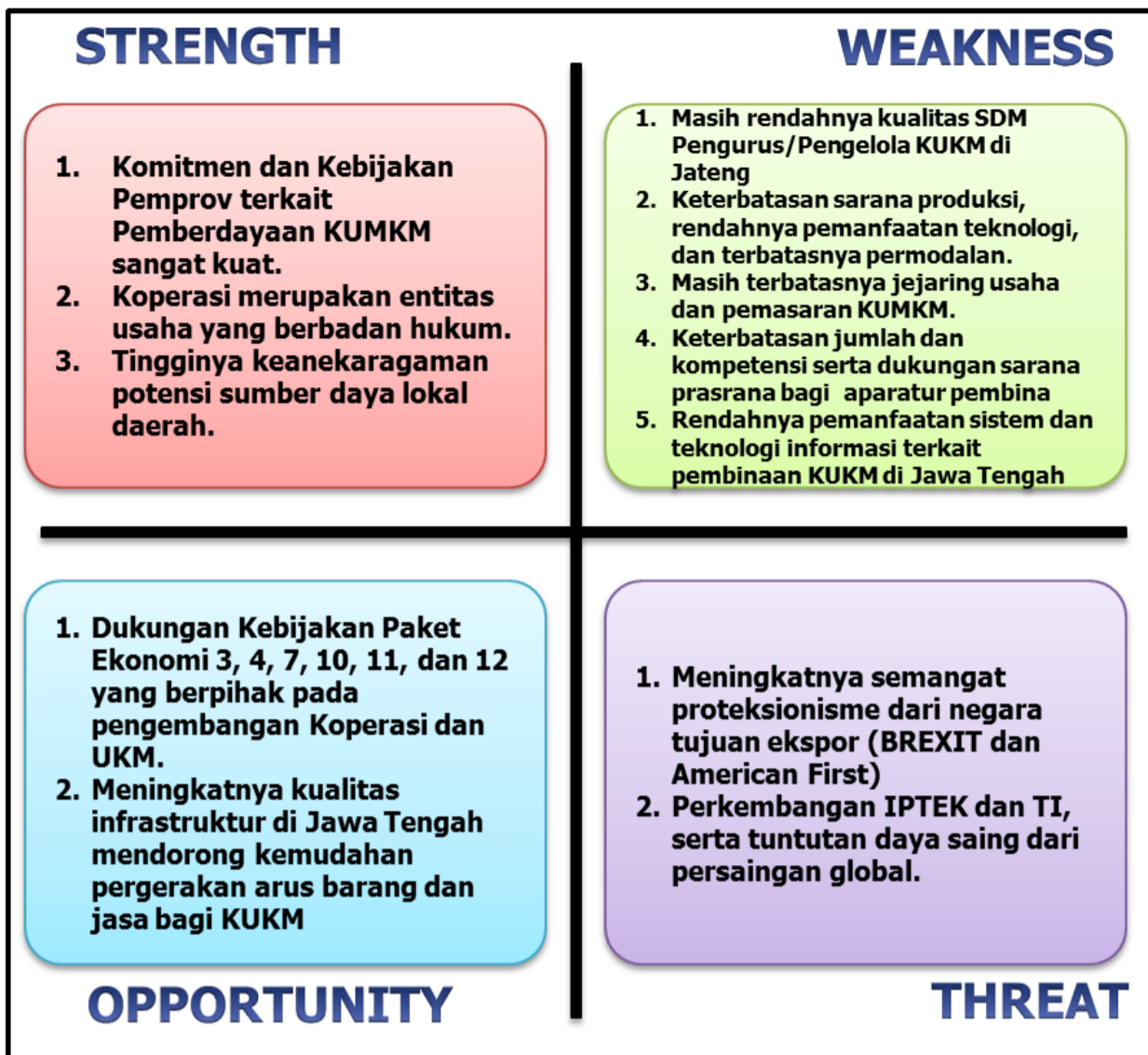
**Tabel 2.7.**  
**Alokasi APBD Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**  
**2013 – 2016**

No	Uraian	APBD 2014	APBD 2015	APBD 2016	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	% 2014	% 2015	% 2016	Rata - rata Δ Anggaran	Rata - rata Δ Realisasi
1	Pendapatan	469.050.000	579.700.000	615.000.000	486.715.000	586.797.626	618.690.000	103,77	101,22	100,60	14,84%	13,00%
2	Belanja Tidak Langsung	16.601.651.000	20.407.516.000	20.507.124.000	15.438.971.715	19.898.268.412	19.931.167.740	93,00	97,50	97,19	11,71%	14,52%
3	Belanja Langsung	44.774.279.000	38.909.991.000	42.049.625.000	43.510.757.219	37.310.029.050	40.963.209.153	97,18%	95,89%	97,42%	-2,51%	-2,23%

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dalam menghadapi periode akhir RPJMD 2013 – 2018, kondisi lingkungan pemberdayaan KUKM menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Pemberdayaan KUKM periode 2013 – 2016 di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.8.

**Gambar 2.8.**  
**Matrik SWOT Pemberdayaan KUKM**  
**Jawa Tengah 2013 - 2016**



Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan KUMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan KUMKM, diantaranya adalah UU No. 25/1992 tentang Perkoprasian, UU No. 20/2008 tentang UMKM, UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008, maupun Paket Kebijakan Ekonomi 3, 4, 7, 10, 11, dan 12 yang memberikan kemudahan usaha serta insentif bagi UKM. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan KUKM, yaitu :

- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
- Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
5. Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 518/23546 Tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah.
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/06544 tanggal 31 Maret 2011 tentang Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro dan Kelompok Usaha Bersama dengan memfasilitasi Pembentukan Koperasi.
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. No.518/15158 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penanganan Koperasi tidak aktif secara komprehensif dengan Kabupaten/Kota
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/17567 tanggal 21 September 2011 tentang Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas Jawa Tengah di setiap Kabupaten/Kota
10. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/016736/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Pengembangan Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Kerakyatan.

berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan KUKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan KUKM.

Seiring dengan meningkatnya semangat proteksionisme dari negara –tujuan utama ekspor Jawa Tengah yang dapat dilihat dari kebijakan BREXIT dan *American First*, maka tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UKM akan semakin kompleks. Hambatan perdagangan seperti pengenaan tarif dan bea bagi produk KUKM Jawa Tengah tentunya menurunkan daya saing produk kita dalam memasuki pasar mereka, untuk itu kita perlu terus mendorong reformasi kebijakan dalam hal penyediaan infrastruktur serta dukungan logistik kita sehingga semakin efisien dalam mendukung pergerakan arus barang dan jasa serta mampu mengkompensasi atas pengenaan tariff dan bea masuk tersebut.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM yang masih harus menjadi perhatian dalam periode akhir RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja dan bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengurus/pengelola koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.
3. Jumlah aparatur pembina koperasi dan UMKM di daerah relatif terbatas, selain itu kapasitas dan dukungan sarana prasarana bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga kurang memadai.

### **BAB III**

## **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN KOPERASI DAN UMKM**

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng pada tabel 3.1



**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi**  
**OPD Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng**

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Masih lemahnya kualitas administrasi usaha Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keterbatasan jumlah tenaga Pembina Koperasi.</li> <li>❖ Masih lemahnya kompetensi SDM Aparatur Pembina Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terbatasnya jumlah manajer Koperasi yang memiliki kompetensi terkait pengelolaan usaha Koperasi</li> <li>❖ Rendahnya rasio antara jumlah pengawas koperasi dengan jumlah koperasi</li> </ul>	Banyak koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
Mayoritas KSP di Jawa Tengah masih berkategori cukup sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keterbatasan jumlah tenaga Penilai Kesehatan KSP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurangnya pemahaman pengelola KSP tentang penilaian kesehatan</li> <li>❖ Banyaknya calon anggota dari KSP sehingga mempengaruhi tingkat penilaian kesehatannya.</li> </ul>	KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.
Banyak UMKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keterbatasan jumlah personel dalam melakukan sosialisasi</li> <li>❖ Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait tentang perluasan akses pembiayaan bagi KUKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara akses kredit dari lembaga keuangan</li> <li>❖ Mayoritas KUKM tidak memiliki sistem administrasi usaha yang jelas.</li> </ul>	Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan
Pemasaran produk KUMKM masih sebatas pasar lokal	Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung pengembangan pemasaran KUKM di Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keterbatasan anggaran KUMKM untuk promosi produknya.</li> <li>❖ Keterbatasan modal mengakibatkan KUKM tidak dapat menerapkan sistem konsinyasi.</li> <li>❖ Kurangnya pemahaman KUKM mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran.</li> </ul>	Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas

<b>KONDISI SAAT INI</b>	<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>		<b>PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD</b>
	<b>INTERNAL</b>	<b>EKSTERNAL</b>	
Sistem produksi KUMKM masih sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan tenaga pendamping di Jawa Tengah</li> <li>❖ Jumlah tenaga pendamping masih terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keterbatasan dalam hal penguasaan sarana prasarana pendukung produksi.</li> <li>❖ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi.</li> </ul>	KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya
Banyak KUMKM yg belum memiliki kompetensi dalam penguasaan IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terbatasnya jumlah Instruktur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan KUKM di Jawa Tengah.</li> <li>❖ Kurangnya sarana prasarana pendukung UPTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rendahnya kesadaran untuk mengikuti diklat yang diadakan SKPD teknis</li> <li>❖ Belum tersedianya database peserta pelatihan KUMKM secara lengkap</li> </ul>	Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

### 3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM PROVINSI JAWA TENGAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013 – 2018, ditetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah **“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI - Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**. Dari visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.**

Dalam tabel 3.2 berikut disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program**  
**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Misi ke-2 <b>“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”</b>			
	<b>Program Mewujudkan Desa Mandiri</b>	Banyak koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	Keterbatasan jumlah tenaga pengawas Koperasi yang kompeten. Terbatasnya jumlah penyelenggaraan Diklat Pengawasan Koperasi.	Tingginya komitmen Pemprov. Jateng terkait pemberdayaan KUMKM yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
		Mayoritas KSP di Jawa Tengah masih berkategori cukup sehat	Rendahnya pemahaman KSP terkait peraturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi.
		Kurangnya pemahaman UKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	Belum terpadunya berbagai kebijakan pemberdayaan KUMKM sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat parsial	
		Jangkauan pemasaran produk KUKM masih terbatas		
		KUKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya		
		Rendahnya kualitas SDM KUKM dlm menghadapi perkembangan IPTEK.		

### 3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015 – 2019, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan untuk **“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”**. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya – upaya antara lain :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Adapun sasaran strategis di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor – sektor unggulan.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**  
**Terhadap RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM RI**

<b>Tujuan :</b> <b>Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan</b>				
<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor – sektor unggulan.	❖ Lemahnya kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terbatasnya jumlah Instruktur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan KUKM di Jawa Tengah.</li> <li>❖ Kurangnya sarana prasarana pendukung UPTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dukungan paket kebijakan pemberdayaan KUKM yang lengkap.</li> <li>❖ Tingginya komitmen, baik dari pemerintah maupun swasta, dalam mendukung pemberdayaan KUKM.</li> </ul>
2	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jangkauan pemasaran produk KUKM masih terbatas</li> <li>❖ KUKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya</li> <li>❖ Kurangnya pemahaman UKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung pengembangan pemasaran KUKM di Jawa Tengah</li> <li>❖ Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan tenaga pendamping di Jawa Tengah</li> <li>❖ Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait tentang perluasan akses pembiayaan bagi KUKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prioritas pembangunan di Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2018 diarahkan pada pemberdayaan KUKM</li> </ul>

**Tujuan :**

**Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan**

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.	Minat masyarakat untuk berwirausaha masih rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wirausaha.</li><li>❖ Jumlah tenaga pendamping masih terbatas.</li></ul>	
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku</li><li>❖ KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Keterbatasan jumlah tenaga Pembina Koperasi.</li><li>❖ Masih lemahnya kompetensi SDM Aparatur Pembina Koperasi</li><li>❖ Keterbatasan jumlah tenaga Penilai Kesehatan KSP.</li></ul>	

### **3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan kawasan strategis Provinsi, maka dalam kebijakan pembangunan koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha – usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber – sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.

Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UKM 2013 – 2018 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk – produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (*green economic*) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

### **3.5. TELAAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM JAWA TENGAH**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah, yang mendorong suatu kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral guna menciptakan kesetaraan serta keadilan gender, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah senantiasa memperhatikan



isu – isu aktual terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UKM.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 yang menyatakan bahwa kaum wanita masih cenderung mengalami diskriminasi gender dalam berbagai faktor, maka arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2018 difokuskan pada perluasan akses kredit bagi perempuan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelompok wanita usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para perempuan pelaku usaha.

### **3.6. ISU STRATEGIS**

Dari penjelasan diatas terdapat tiga isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi dan UKM 2013 – 2018, yaitu :

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUMKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dan TI.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 adalah :

#### **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

*“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

#### **4.2 MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

#### **4.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, Koperasi dan UKM mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Adapun salah satu tujuan dari misi tersebut adalah “Mengembangkan Koperasi dan UMKM” dengan sasaran “Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM”. Untuk itu, dari tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah 2013 – 2018 maka dapat dirumuskan tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah “**SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UKM**”. Dimana dari tujuan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran pembangunan dilengkapi dengan indikator sasarnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	
			2017	2018
1	2	3	4	5
<b>SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UKM</b>	Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	Persentase Koperasi Aktif	81,90%	82,50%
		Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	61%	71%
		Persentase Koperasi Sehat	18,30%	19,50%
		Persentase omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	6,90%	7,15%
	Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	210	245
	Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa Tengah	Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi	13,55%	14,40%
		Persentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	13,10%	13,45%
		Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi	13,85%	14,50%
		Persentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	12,50%	13,00%
		Persentase UMKM yang telah mengakses kredit	25,5%	25,8%
		Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,75%	13,50%
		Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	16 Prov, 3 LN	19 Prov, 4 LN
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah	Jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah	325	350
	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM	Jumlah SDM KUKM yang kompeten	17.375	19.575
	Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian perencanaan pemberdayaan KUKM Pusat dan Daerah	100%	100%
	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi khusus	38	40

#### **4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD**

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan strategi dan kebijakan umum untuk tiap tujuan pembangunan :

##### **1. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah**

Strategi :

- a. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana koperasi;
- b. Meningkatkan ketertiban administrasi Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- c. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pemahaman dan kapasitas Pengurus/Pengawas terkait kelembagaan dan tata laksana Koperasi;
- b. Pembinaan dan pengawasan koperasi;
- c. Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan Badan Hukum/Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
- d. Edukasi masyarakat atas perkoperasian.

##### **2. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah**

Strategi :

- a. Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam hal pengembangan OVOP di Jawa Tengah;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat atas produk OVOP.

##### **3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Tengah**

Strategi :

- a. Peningkatan produktivitas dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Koperasi dan UKM;
- b. Restrukturisasi Manajemen dan Usaha bagi Koperasi dan UKM;
- c. Peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM;
- d. Peningkatan akses pemasaran bagi produk Koperasi dan UKM.

- e. Peningkatan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi bagi KUKM

Kebijakan :

- a. Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UKM tentang *good manufacturing process*;
- b. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi Koperasi dan UKM;
- c. Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UKM tentang akses pembiayaan;
- d. Meningkatkan jejaring, sistem distribusi dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UKM.
- e. Penyusunan sistem informasi Koperasi dan UKM di Jawa Tengah
- f. Peningkatan penguasaan teknologi informasi bagi KUKM di Jawa Tengah

#### **4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah**

Strategi :

- a. Pengembangan Inkubator Bisnis;
- b. Pengembangan Klinik Bisnis pada Pusat Layanan Usaha Terpadu.

Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan bagi Calon Wirausaha Baru (Angkatan Kerja Baru);
- b. Menyelenggarakan Temu Bisnis dan Pemagangan Kerja.

#### **5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Koperasi dan UKM**

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengurus/Pengelola KUKM.
- b. Peningkatan kualitas Instruktur dan Tenaga Pendamping bagi KUKM

Kebijakan :

- a. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola Koperasi dan UKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas Instruktur maupun tenaga pendamping.
- c. Optimalisasi pemanfaatan tenaga pendamping dengan fokus pada pemberdayaan KUKM.

## **6. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUKM**

Strategi :

- a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah

Kebijakan :

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah

## **7. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur**

Strategi :

- a. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur.

Kebijakan :

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur sesuai kebutuhan.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum disajikan secara lengkap dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum**  
**Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
1	2	3	4	
<b>SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UKM</b>	Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana koperasi.	Peningkatan pemahaman dan kapasitas Pengurus/Pengawas terkait kelembagaan dan tata laksana koperasi.	
		Meningkatkan ketertiban administrasi Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.	Pembinaan dan pengawasan koperasi;	
		Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi.	Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan BH/AD Koperasi dan Pembubaran Koperasi; Edukasi masyarakat atas perkoperasian.	
	Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah		Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam hal pengembangan OVOP di Jawa Tengah.
				Peningkatan kesadaran masyarakat atas produk OVOP
	Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa Tengah	Peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi Koperasi dan UKM		Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UKM tentang <i>good manufacturing process</i> .
				Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi Koperasi dan UKM.
				Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UKM tentang akses pembiayaan
				Meningkatkan jaringan distribusi dan saluran pemasaran bagi produk Koperasi dan UKM

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Peningkatan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi bagi KUKM	Penyusunan sistem informasi Koperasi dan UKM di Jawa Tengah
			Peningkatan penguasaan teknologi informasi bagi KUKM di Jawa Tengah
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah	Pengembangan Inkubator Bisnis	Menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan bagi Calon Wirausaha Baru (Angkatan Kerja Baru)
		Pengembangan Klinik Bisnis pada Pusat Layanan Usaha Terpadu	Menyelenggarakan Temu Bisnis dan Pemagangan Kerja
	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengurus/ Pengelola KUKM	Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola Koperasi dan UKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi
		Peningkatan kualitas Instruktur dan Tenaga Pendamping bagi KUKM	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas Instruktur maupun tenaga pendamping. Optimalisasi pemanfaatan tenaga pendamping dengan fokus pada pemberdayaan KUKM.
	Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah	Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah
	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur	Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur sesuai kebutuhan.



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UKM perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018 dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi	
						2017		2018		Kondisi Akhir				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Sejahtera bersama Koperasi dan UKM	Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	Persentase Koperasi Aktif	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi Provinsi			6.564.033.000		13.705.000.000		13.705.000.000	DISKOP UKM		
		Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah masyarakat yg ditingkatkan pemahamannya	90 pokmas	90 pokmas	812.500.000	1.000 org	3.480.000.000	1.000 org	3.480.000.000	DISKOP UKM		
		Persentase Koperasi Sehat	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang diawasi	576 Kop	576 Kop	1.812.500.000	635 Kop	2.500.000.000	635 Kop	2.500.000.000	DISKOP UKM		
		Persentase omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	Jumlah Kop yg diperingkat & dinilai kesehatannya	467 Kop	467 Kop	1.512.500.000		-		-		DISKOP UKM	
			Kegiatan Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	Jumlah Kop yg ditingkatkan kualitas manajemen & usahanya	300 Kop	300 Kop	1.512.500.000		-		-		DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	914.033.000	6 dokumen	1.025.000.000	6 dokumen	1.025.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penguatan Tata Laksana Koperasi	Jumlah Kop/Org Yg ditingkatkan kualitas tata laksanaannya				430 Kop; 1.000 org	4.500.000.000	430 Kop; 1.000 org	4.500.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah	Jumlah Kop yg dinilai kesehatannya				437 KSP	2.200.000.000	437 KSP	2.200.000.000	DISKOP UKM	
	<b>Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah</b>	<b>Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah</b>	<b>Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal</b>				<b>9.531.000.000</b>		<b>9.450.000.000</b>		<b>9.450.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	
			Kegiatan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil tembakau	Jumlah masyarakat yg menerima penguatan usaha	2.910 orang	2.910 orang	6.350.000.000	1.200 org	3.750.000.000	1.200 org	3.750.000.000	DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Perlindungan Produk UMKM	Jumlah sertifikasi produk	45 UMKM	45 UMKM	500.000.000	365 UKM	1.000.000.000	365 UKM	1.000.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	Jumlah UMKM yg ditingkatkan produktivitasnya	300 org	300 org	1.400.000.000		-	0	-	DISKOP UKM	
			Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumen	Jumlah Kop Produksi & Kop Konsumen yg ditingkatkan kualitas usahanya	440 Kop	440 Kop	681.000.000		-	0	-	DISKOP UKM	
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	Jumlah Kop Tan yg ditingkatkan kualitas usahanya	675 Kop/KUD	675 Kop/KUD	600.000.000		-	0	-	DISKOP UKM	
			Kegiatan Restrukturisasi Manajemen dan Usaha Koperasi dan UKM	Jumlah KUKM yg ditingkatkan kualitas usahanya				1.470 KUKM	2.450.000.000	1.470 KUKM	2.450.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Peningkatan Produksi Koperasi dan UKM	Jumlah KUKM yg ditingkatkan produksinya				490 KUKM	2.250.000.000	490 KUKM	2.250.000.000	DISKOP UKM	
	<b>Meningkatnya daya saing KUKM di Jawa Tengah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi</b>	<b>Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran Jaringan Usaha</b>				<b>3.025.000.000</b>		<b>10.633.000.000</b>		<b>10.633.000.000</b>	DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		<b>Persentase Pertumbuhan Omset UKM yang dibina</b>	Kegiatan Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	Jangkauan pemasaran produk KUKM	8%	8%	300.000.000	2 Prov	500.000.000	2 Prov	500.000.000	DISKOP UKM	
		<b>Jangkauan Pemasaran Produk KUKM</b>	Kegiatan Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	Jangkauan pemasaran produk KUKM	8%	8%	2.250.000.000	17 Prov, 4 LN	4.295.000.000	17 Prov, 4 LN	4.295.000.000	DISKOP UKM	
		<b>Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUKM</b>	Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha bagi KUMKM	Jumlah KUKM yg difasilitasi layanan usahanya	400 orang	400 orang	325.000.000	500 orang	1.000.000.000	500 orang	1.000.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Komite Pemasaran Produk Unggulan rodok KUMKM	Jumlah layanan KPPUD	1 Layanan	1 Layanan	150.000.000	1 Layanan	-	1 Layanan	-	DISKOP UKM	
			Kegiatan Promosi Produk KUKM Jawa Tengah					3 Media	4.838.000.000	3 Media	4.838.000.000		
	<b>Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah</b>	<b>Jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM</b>				<b>5.575.000.000</b>		<b>6.150.000.000</b>		<b>6.150.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Jumlah org yg ditingkatkan ketrampilannya	3.980 orang	3.980 orang	1.650.000.000	3.000 org	1.650.000.000	3.000 org	1.650.000.000	DISKOP UKM	
	<b>Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM</b>	<b>Jumlah SDM KUKM yang kompeten</b>	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUKM	Jumlah KUKM yg dilatih	2.000 orang	2.000 orang	3.925.000.000	1.750 org	4.500.000.000	1.750 org	4.500.000.000	DISKOP UKM	
	<b>Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi</b>	<b>Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan</b>				<b>1.700.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	
		<b>Persentase Pertumbuhan Aset UKM yang dibina</b>	Kegiatan Akses Permodalan bagi KUMKM	Jumlah KUKM yg difasilitasi akses permodalannya	500 KUMKM	500 KUMKM	1.300.000.000	3.465 KUKM	1.850.000.000	3.465 KUKM	1.850.000.000	DISKOP UKM	
		<b>Presentase UMKM yang telah mengakses kredit</b>	Kegiatan Pengendalian Pembiayaan KUMKM	Jumlah KUKM yg dievaluasi	500 KUMKM	500 KUMKM	400.000.000	750 KUKM	500.000.000	750 KUKM	500.000.000	DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>4.981.000.000</b>		<b>8.152.000.000</b>		<b>8.152.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Dinas	Jumlah Surat yg dikirim	12 bln	12 bln	12.000.000	6.000 surat	20.000.000	6.000 surat	20.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada UPTD	Jumlah Surat yg dikirim	12 bln	12 bln	7.000.000	4.000 surat	8.000.000	4.000 surat	8.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Komunikasi SDA dan Listrik	12 bln	12 bln	600.000.000	12 bln	900.000.000	12 bln	900.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD	Jumlah Pemakaian Komunikasi SDA dan Listrik	12 bln	12 bln	250.000.000	12 bln	350.000.000	12 bln	350.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yg dijamin	29 unit	29 unit	70.000.000	4 Gedung 12 Motor, 13 Mobil	90.000.000	4 Gedung 12 Motor, 13 Mobil	90.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas pada Dinas	Jumlah Kantor/Rumah Dinas yg dibersihkan	3 unit	3 unit	535.000.000	3 gedung, 18 personil	800.000.000	3 gedung, 18 personil	800.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas pada UPTD	Jumlah UPTD yg dibersihkan	12 bln	12 bln	250.000.000	1 gedung	350.000.000	1 gedung	350.000.000	DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Dinas	Jumlah Alat Tulis Kantor yg dibeli	12 bln	12 bln	200.000.000	3 lokasi, 12 bln	450.000.000	3 lokasi, 12 bln	450.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada UPTD	Jumlah Alat Tulis Kantor yg dibeli	12 bln	12 bln	50.000.000	1 lokasi, 12 bln	54.000.000	1 lokasi, 12 bln	54.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas	Jumlah Barang Cetak	12 bln	12 bln	50.000.000	12 bln	150.000.000	12 bln	150.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada UPTD	Jumlah Barang Cetak	12 bln	12 bln	25.000.000	12 bln	27.000.000	12 bln	27.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas	Jumlah komponen instalasi listrik	12 bln	12 bln	50.000.000	3 gedung, 12 bln	100.000.000	3 gedung, 12 bln	100.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD	Jumlah komponen instalasi listrik	12 bln	12 bln	50.000.000	1 gedung, 12 bln	54.000.000	1 gedung, 12 bln	54.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Dinas	Jumlah peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	20.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada UPTD	Jumlah peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	11.000.000	DISKOP UKM	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas	Jumlah bahan bacaan	12 bln	12 bln	24.000.000	4 surt kabar, 1 majalh, 12 bln	35.000.000	4 surt kabar, 1 majalh, 12 bln	35.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada UPTD	Jumlah bahan bacaan	12 bln	12 bln	10.000.000		11.000.000	0	11.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	12 bln	12 bln	75.000.000	9.500 OK	200.000.000	9.500 OK	200.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah pada Dinas	Volume rapat koordinasi	12 bln	12 bln	1.135.000.000	2.680 OH	2.600.000.000	2.680 OH	2.600.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah pada UPTD	Volume rapat koordinasi	12 bln	12 bln	75.000.000	12 bln	150.000.000	12 bln	150.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran pada Dinas	Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan	12 bln	12 bln	800.000.000	40 org, 6 pkt	1.300.000.000	40 org, 6 pkt	1.300.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran pada UPTD	Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan	12 bln	12 bln	83.000.000	12 bln	192.000.000	12 bln	192.000.000	DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi	12 bln	12 bln	600.000.000	41 pkt	250.000.000	41 pkt	250.000.000	DISKOP UKM	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.634.000.000</b>		<b>4.406.000.000</b>		<b>4.406.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Dinas	Jumlah Gedung Kantor yg dipelihara	2 unit	2 unit	450.000.000	15 pkt	750.000.000	15 pkt	750.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada UPTD	Jumlah UPTD yg dipelihara	1 unit	1 unit	48.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	21 unit	21 unit	350.000.000	12 motor, 13 mobil, 4 genset	750.000.000	12 motor, 13 mobil, 4 genset	750.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair pada Dinas	Jumlah Meubelair	12 bln	12 bln	20.000.000	7 pkt	50.000.000	7 pkt	50.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair pada UPTD	Jumlah Meubelair	12 bln	12 bln	20.000.000	12 bln	21.000.000	12 bln	21.000.000	DISKOP UKM	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada Dinas	Jumlah peralatan kantor & RT	12 bln	12 bln	250.000.000	14 pkt	400.000.000	14 pkt	400.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada UPTD	Jumlah peralatan kantor & RT	12 bln	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas	Jumlah sarpras kantor	12 pkt	12 pkt	380.000.000	12 pkt	1.000.000.000	12 pkt	1.000.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD	Jumlah sarpras kantor	2 pkt	2 pkt	66.000.000	2 pkt	1.000.000.000	2 pkt	1.000.000.000	DISKOP UKM	
			Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Pelatihan Koperasi dan UKMKM						175.000.000		175.000.000		
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				-		<b>120.000.000</b>		<b>120.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				140 org, 2 jenis	120.000.000	140 org, 2 jenis	120.000.000	DISKOP UKM	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>50.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>	<b>DISKOP UKM</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD	Lokasi
						2017		2018		Kondisi Akhir			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yg dilatih	146 orang	146 orang	50.000.000	5 pkt	250.000.000	5 pkt	250.000.000	DISKOP UKM	
<b>TOTAL</b>							<b>33.060.033.000</b>		<b>55.216.000.000</b>		<b>55.216.000.000</b>		

**BAB VI**  
**MATRIK INDIKATOR KINERJA RPJMD**  
**DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH**

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah untuk diwujudkan dalam kurun waktu 2 tahun Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagai pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**MATRIK INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN OPD**  
**DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja		Kondisi Akhir
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
<b>INDIKATOR KINERJA DAERAH</b>					
1	Persentase Koperasi Aktif terhadap Jumlah Koperasi	79,73%	81,90%	82,50%	82,50%
2	Persentase Koperasi Sehat terhadap KSP	15,02%	18,30%	19,50%	19,50%
3	Jumlah Produk OVOP	70	210	245	245
<b>INDIKATOR KINERJA SKPD</b>					
1	Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	30%	61%	71%	71%
2	Persentase UMKM yg telah mengakses kredit	17,97%	25,5%	25,8%	25,8%
3	Jangkauan pemasaran produk KUMKM	5 Prov	16 Prov, 3 LN	19 Prov, 4 LN	19 Prov, 4 LN
4	Jumlah SDM KUMKM yg terlatih	12.490	17.375	19.575	19.575

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018 merupakan suatu dokumen strategis sebagai pedoman dan arah pembangunan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah selama dua tahun ke depan. Diharapkan dengan adanya dokumen ini akan menyamakan persepsi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat Koperasi dan UKM untuk secara bersinergi dan bersama – sama mewujudkan visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”.

Mengingat bahwa renstra menjadi panduan bagi segenap pembina serta masyarakat Koperasi dan UKM dalam melaksanakan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Sinergisitas segenap pihak dalam pelaksanaan renstra ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan, serta memfasilitasi tumbuh berkembangnya koperasi dan UKM di Jawa Tengah yang pada akhirnya akan turut serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Setelah berakhirnya Renstra Koperasi dan UKM tahun 2017 – 2018, perlu disusun Renstra baru untuk periode 2018 – 2023 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2019. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2019 akan mendasarkan pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2019.

Akhir kata diharapkan peran serta dukungan masyarakat khususnya pelaku koperasi dan UMKM untuk secara bersama mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan yang sudah ditetapkan.

KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660517 199008 2 001